

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja, pada saat ini Kesempatan kerja menjadi hal yang mendasar dalam kehidupan manusia tidak berbeda dengan sandang, pangan dan papan, dalam aspek sosial dan ekonomi. (Panjawa,2014) menyebutkan ialah bahwa salah satu indikator dalam mengukur perkembangan perekonomian suatu wilayah dapat digambarkan dari penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan jumlah lapangan pekerjaan dan jenis kesempatan kerja di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang cepat tak bisa memberi jaminan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut jika tidak turut dalam memperluas peluang kerja dalam menampung pekerja-pekerja baru yang memasuki lingkungan kerja setiap tahunnya (Sandika, 2014)

Potensi perekonomian dalam wilayah memberikan gambaran seberapa jauh beragam SDA serta SDM memiliki kekuatan untuk mendorong perkembangan ekonomi secara produktif. Secara garis besar, sumber daya alam ialah keseluruhan hal yang bersumber dari alam, seperti pertanian, perikanan/kelautan, serta pertambangan yang dikelola dengan efisien. Pada saat yang sama, potensi sumber daya manusia juga faktor yang amat penting dalam hal keberhasilan pembangunan ekonomi, bukan hanya jumlah penduduk tetapi juga jumlah karyawan yang dapat memproduksi juga termasuk komponen penting bagi keberhasilan pembangunan perekonomian.

Memanfaatkan tenaga kerja yang ada mampu mempercepat pembangunan daerah serta pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya keberhasilan pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan pembangunan yang bertumpu pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dalam hal jumlah, produktivitas, dan efisiensi yang optimal

Dalam masalah ketenagakerjaan jika semakin tinggi angka pengangguran akan meningkatkan kemiskinan, kriminalitas, dan fenomena-fenomena sosial-ekonomi yang terjadi di masyarakat. Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang secara langsung memengaruhi perekonomian dan termasuk masalah yang paling berat. Masalah pengangguran timbul akibat dari imbas jumlah tenaga kerja tidak seimbang dengan jumlah kesempatan kerja. Pengangguran yang selalu bertambah tentunya akan meningkatkan beban perekonomian serta mengurangi kesejahteraan masyarakat (Hadi Sasana, 2009). pengangguran ini pada akhirnya mengarah pada konsekuensi ketidakstabilan perekonomian dan memperlambat pembangunan ekonomi, yang nantinya dapat menyebabkan ketidakstabilan di bidang sosial dan ekonomi lainnya. Ini merupakan permasalahan yang harus dapat di selesaikan agar terciptanya pemerataan, kesejahteraan dan pembangunan baik sosial maupun ekonomi. Peran pemerintah sangatlah penting dalam Perumusan kebijakan yang dapat mampu mendorong penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan penduduk, yang pertumbuhannya cenderung lebih cepat dari penyerapan kerja. Wilayah provinsi sumatera utara memiliki ketersediaan sumber

daya manusia yang potensial, namun permasalahan timbul karena terkendala pada bidang ketenagakerjaan yaitu lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan tingginya jumlah penduduk.(Sri Budhi, 2008) suatu perekonomian dapat dikatakan stabil apabila tingkat penganggurannya di bawah 4 persen dari total pencari kerja. Untuk melihat gambaran penyerapan tenaga kerja Kuncoro (2002) menyatakan penyerapan tenagakerja dilihat dari jumlah lapangan pekerjaan yang telah diisi yang dicerminkan melalui jumlah penduduk yang berkerja dalam suatu wilayah.

Tabel 1.1 Penyerapan Tenagakerja Di Provinsi Sumatera utara

Tahun	Bekerja (Jiwa)	Jumlah Pengangguran (Jiwa)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
2010	6.125.571	491.806	69,51	7,43
2011	5.912.114	402.125	72,09	6,37
2012	5.751.682	379.982	69,41	6,20
2013	5.899.566	412.202	70,67	6,53
2014	5.881.371	390.712	67,07	6,23
2015	5.962.304	428.794	67,28	6,71
2016	5.991.673	372.000	65,99	5,84
2017	6.365.989	377.288	68,88	5,6
2018	6.728.431	396.027	71,82	5,56
2019	6.681.224	382.438	70,19	5,41
2020	6.842.252	507.805	68,67	6,91
2021	7.003.124	475.156	69,10	6,33

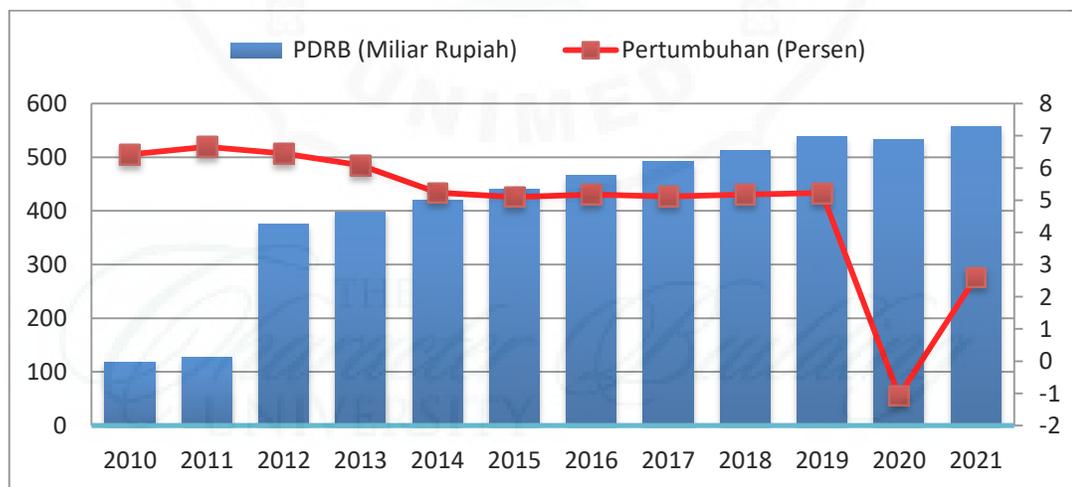
Sumber BPS Sumatera Utara

Tabel 1.1 tersebut memperlihatkan penyerapan tenaga kerja Sumatera Utara dari segi jumlah bekerja sering mengalami pertumbuhan dan penurunan setiap tahunnya, dimana penyerapan tenaga kerja pada tahun 2010 terdapat 6 juta jiwa bekerja dan tahun tahun berikutnya menurun hingga pada tahun 2016 kembali menajpai ke 6 juta jiwa bekerja, di tahun 2021 penyerapan tenagakerja di sumatera utara telah mencapai 7 juta jiwa bekerja. Dilihat dari tingkat partisipasinya juga bervariasi, pada tahun 2011 TPAK Sumut sebesar 72 persen dan bervariasi tiap tahun, di tahun 2018 TPAK Sumut sebesar 71,82 persen yang merupakan jumlah tertinggi semejak tahun 2011 dan turun pada tahun berikutnya hingga pada penutup tahun 2021 TPAK Sumut sebesar 69 persen. Jika melihat jumlah pengangguran di Sumatera Utara mengalami penurunan namun jika dilihat dari tingkat pengangguran terbuka masih di kisaran angka 6 persen tahun 2010 hingga 2015 dan menjadi 5 persen pada tahun 2015 hingga 2021 dan jumlah tersebut masih tergolong tinggi. Ini menggambarkan kondisi ketenagakerjaan wilayah Provinsi sumatera utara belum cukup baik. Beberapa faktor yang hendak dianalisis yang kemungkinan akan memberi pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja adalah pertumbuhan ekonomi diperhatikan melalui pertumbuhan PDRB, total penduduk usia produktif, dan taraf upah minimum provinsi yang ditentukan.

Menurut Schumpeter dalam (Boediono, 2012:48) pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan output masyarakat karena bertambahnya faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tanpa mengubah cara teknologi itu

sendiri. Wilayah Sumatera Utara ialah satu diantara beberapa provinsi di Indonesia dengan PDB yang cukup tinggi. Di tahun 2015-2021, pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara selalu lebih besar dibanding pertumbuhan ekonomi nasional. Dayuh (2012) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan erat dengan produksi, dimana semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi akan turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Banyaknya kesempatan atau penyerapan tenaga kerja dapat dilihat dari jumlah produksi di suatu wilayah. PDRB merupakan salah satu instrumen data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara



Sumber BPS Sumatera Utara

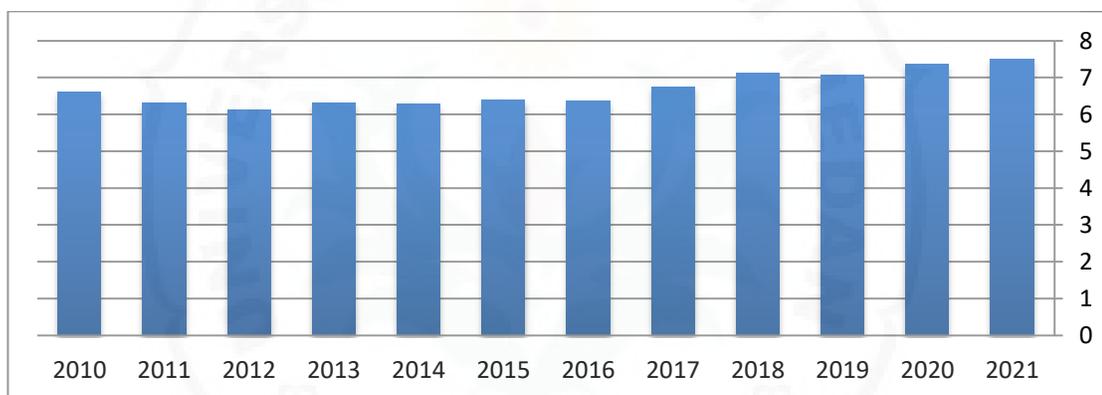
Gambar 1.1 tersebut memperlihatkan laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara periode 2011 hingga 2021, di tahun 2010 PDRB Sumatera Utara yaitu Rp.118718,9 miliar meningkat menjadi Rp.556835,87 miliar ditahun 2021 yang

memiliki rerata pertumbuhan diatas 5 persen jumlah tersebut merupakan diatas jumlah rerata pertumbuhan ekonomi nasional. Di tahun 2010 hingga tahun 2013 pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara berada di kisaran 6 persen dari Rp. 11.8718,9 miliar pada 2010 menjadi Rp. 3.98.727,14 miliar pada tahun 2013, dan di periode 2014 hingga 2019 pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menurun berada di kisaran 5 persen, dimana di tahun 2014 PDRB Sumut sebesar 4.19.573,31 miliar menjadi Rp.539.513,85 miliar ditahun 2019 serta ditahun 2020 mendapati penurunan -1,07 persen (Rp.533.746,36 miliar) akibat dampak pandemi covid-19 yang ada di Indonesia serta mulai mengalami pertumbuhan 2,61persen (Rp.518.313,14 miliar). Peningkatan PDRB yang dapat diartikan meningkatnya jumlah produksi suatu barang/jasa tentu akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, Amri (dalam Alghofari, 2009) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa ataupun daerah yang meningkat memberikan gambaran kondisi ekonomi di negaraa atau wilayah tersebut berkembang dengan optimal. Apabila peningkatan terus terjadi, sehingga aktivitas ekonomi juga akan bertambah sehingga akan turut meningkatkan jumlah permintaan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi memberikan kesempatan kepada pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya (Askenazy, 2003)

Sumatera Utara juga merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dengan jumlah penduduk sekitar 14.93 juta jiwa atau 5,48 persen dari distribusi penduduk

nasional pada 2021 dengan jumlah penduduk yang banyak tentu memiliki jumlah angkatan kerja yang banyak, Semakin banyak angkatan kerja maka penawaran tenaga kerja juga akan meningkat (Santoso,2012). Berdasarkan BPS angkatan kerja setidaknya penduduk dengan usia 15-65 tahun.

Gambar 1.2 Jumlah Angkatan Kerja Sumatera Utara



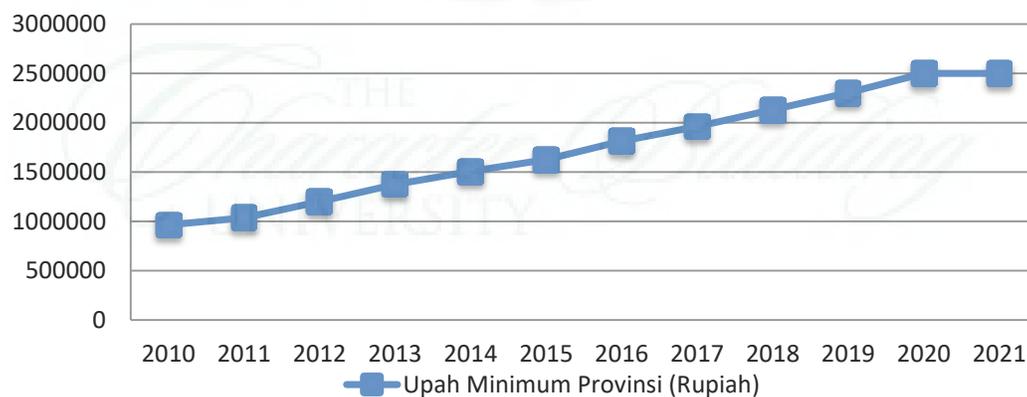
Sumber BPS Sumatera Utara

Pada gambar 1.2 total angkatan kerja pada wilayah Sumatera Utara dalam periode 2010 hingga 2021 dimana jumlah angkatan kerja Sumatera Utara dari 6.617.377 jiwa 2010 menjadi 7.511.006 jiwa pada 2021 peningkatan jumlah angkatan kerja ini tak lepas dari pengaruh pertumbuhan penduduk di Sumatera Utara dan jumlah angkatan kerja cenderung fluktuasi dimana tahun 2011 terdapat 6.314.239 jiwa angkatan kerja menurun di tahun berikutnya menjadi 6.131.664 dan meningkat lagi di tahun 2013 6.311.762 jiwa dan menurun lagi pada tahun 2014 menjadi 6.272.083 jiwa dan jumlah ini meningkat terus hingga tahun 2018 menjadi 7.124.458 jiwa. pada tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi 7.063.662 jiwa kemudian pada tahun

2020 naik menjadi 7.350.057 jiwa dan naik lagi 7.511.006 jiwa pada tahun 2021. Todaro (2004) menyatakan peningkatan angkatan kerja dengan cara tradisional diindikasikan merupakan faktor positif yang mempercepat perkembangan ekonomi, Banyaknya penduduk usia produktif akan dapat meningkatkan jumlah produksi dan tentu akan meningkatkan jumlah penghasilan yang dapat mendorong penyerapan tenaga kerja baru. Penawaran tenaga kerja sangat ditentukan dari banyaknya penduduk usia produktif yang dimiliki menjadi angkatan kerja.

Penyerapan tenaga kerja di provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari hubungan antara upah dan jumlah pekerja yang akan dipekerjakan oleh para pengusaha. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan inflasi, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi

Gambar 1.3 Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara



Sumber BPS Sumater Utara

Pada Tabel 1.3, upah minimum di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2010 adalah Rp. 965.000 dan akan meningkat setiap tahun hingga tahun 2021 menjadi Rp.

2.522.609. Kondisi upah minimum meningkat setiap tahun, karena merupakan dasar negara untuk menentukan upah minimum regional. Kondisi upah minimum bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain. Upah minimum merupakan faktor yang mempengaruhi ketenagakerjaan, Menurut Mankiw, N.G.(2000), peningkatan pengangguran disebabkan oleh salah satu faktor yaitu Upah, mengemukakan bahwasanya peningkatan upah minimum yang harus dibayarkan akan menurunkan permintaan tenaga kerja yang di butuhkan, yang berujung pada pengangguran. Ekonom David Neumark dan William Wascher (2007) menganggap tingkat upah sebagai faktor pendukung penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan uraian diatas perlu diidentifikasi lebih baik agar keadaan penyerapan tenaga kerja bisa di ketahui. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, tersedianya angkatan kerja, dan besar kecilnya taraf upah minimum yang ditentukan. Kondisi penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara menjadi ketertarikan tersendiri untuk dijadikan sebagai bahan penelitian

1.2. Identifikasi Masalah

1. Permasalahan keternagakerjaan masih menjadi salah satu masalah penting untuk di selesaikan. Hal ini merupakan suatu masalah perhatian utama pemerintah sebab berhubungan terhadap pengangguran baik secara langsung ataupun tak langsung

2. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan namun jumlah pengangguran tidak berkurang dan belum dapat mampu menekan tingkat pengangguran terbuka yang masih tetap berada di kisaran 5 persen.
3. Sebanyak 10,42 juta jiwa (69,79%) penduduk Sumut adalah kelompok usia produktif yang berarti menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam Perumusan kebijakan yang dapat mampu mendorong penyediaan lapangan kerja yang cukup

1.3. Pembatasan Masalah

Batasan masalahnya adalah menganalisis penyerapan tenaga kerja di provinsi Sumatera Utara pada periode 2004 hingga 2021. Data yang dibutuhkan pada model penelitian ini ialah data series Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB), Total Angkatan Kerja, Upah Minimum Provinsi, serta Jumlah Tenaga Kerja yang berkerja diberbagai sektor perkonomian Provinsi Sumatera Utara tahun 2004 – 2021.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah pengaruh PDRB, terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara tahun 2004 - 2021?

2. Apakah Pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara tahun 2004 - 2021?
3. Apakah Pengaruh upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara tahun 2004 - 2021?
4. Apakah pengaruh produk dosmetik regional bruto (PDRB), jumlah angkatan kerja dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 - 2021?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB, terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 - 2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 - 2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 - 2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh Produk Dosmetik Regional Bruto (PDRB), jumlah angkatan kerja dan upah minimum terhadap penyerapan tenagakerja di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 - 2021.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Peneliti

Menjadi satu diantara beberapa prasyarat untuk menuntaskan studi Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, serta juga untuk menambah ilmu dan pengalaman penulis, untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan Jurusan Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.

2. Institusi

Dari sudut pandang dunia ilmiah, diinginkan hasil penelitian ini mampu menambah pemahaman dan menjadi bahan pemikiran dan pembahasan dalam penelitian selanjutnya atau acuan untuk merumuskan masalah baru

3. Objek yang diteliti

Bagi pemerintah, penelitian ini diinginkan agar dapat memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah ketenagakerjaan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja di provinsi Sumatera Utara, dengan tujuan untuk mengurangi peningkatan pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas